

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan menyebutkan bahwa Tugas Pembantuan merupakan penugasan pemerintah kepada pemerintah provinsi atau dari pemerintah provinsi kepada kota/ kabupaten atau dari pemerintah kota/ kabupaten kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Sedangkan Dekonsentrasi merupakan pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/ atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi, Gubernur menyelenggarakan urusan pemerintahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi dilaksanakan setelah adanya penugasan atau pelimpahan wewenang dari Pemerintah melalui Kementerian Negara/ Lembaga kepada Kepala Daerah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia Pasal 4, disebutkan bahwa Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat Provinsi. Kemudian pada Pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa otonomi Provinsi DKI Jakarta diletakkan pada tingkat provinsi.

Sesuai dengan peraturan dimaksud, Provinsi DKI Jakarta tidak dibagi lagi dalam wilayah kota dan kabupaten selain hanya sebagai wilayah administratif. Dengan demikian, dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan di Provinsi DKI Jakarta tidak dilakukan alokasi penugasan dari pemerintah provinsi kepada kota/ kabupaten atau dari pemerintah kota/ kabupaten kepada desa yang berkaitan dengan penyelenggaraan Tugas Pembantuan.

Adapun dasar hukum dan realisasi pelaksanaan Tugas Pembantuan serta Dekonsentrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diterima pada tahun 2013 - 2017 dapat dijelaskan dalam uraian sebagai berikut.

A. DASAR HUKUM TUGAS PEMBANTUAN DAN DEKONSENTRASI

Dasar hukum pelaksanaan Tugas Pembantuan dan Dekonsentrasi adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan .
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi.

B. TUGAS PEMBANTUAN

1. INSTANSI PEMBERI TUGAS DAN PELAKSANA TUGAS PEMBANTUAN (TP)

Selama tahun 2013-2017 Provinsi DKI Jakarta menerima Dana Tugas Pembantuan dari 9 Kementerian yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pariwisata, dan Kementerian Perdagangan. Nilai keseluruhan yang diterima sebesar 135,12 milyar rupiah dengan realisasi sebesar 90,128 milyar rupiah atau 66,70 persen. Adapun instansi pelaksana TP sebanyak 7 SKPD yaitu Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Para Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/ Kabupaten Administrasi yang secara rinci dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel V.1
Instansi Pemberi dan Pelaksana Tugas Pembantuan (TP)
Tahun Anggaran 2013-2017

NO	Kementerian	SKPD Pelaksana	2013			2014			2015			2016			2017		
			ANGGARAN (4)	REALISASI Rp (5)	% (6 = 4:3)	ANGGARAN (4)	REALISASI Rp (5)	% (6 = 4:3)	ANGGARAN (4)	REALISASI Rp (5)	% (6 = 4:3)	ANGGARAN (4)	REALISASI Rp (5)	% (6 = 4:3)	ANGGARAN (4)	REALISASI Rp (5)	% (6 = 4:3)
1	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan Pangan	5.072.600.000	4.818.782.600	95,00	2.326.900.000	1.708.734.050	73,43	8.534.488.000	5.723.511.100	67,06	1.000.000.000	825.862.000	82,59	600.000.000	527.682.014	87,95
2	Kementerian Pertanian	Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan Pangan	1.301.495.000	1.120.079.800	86,06	-	-	-	525.540.000	459.000.000	87,34	397.890.000	393.211.951	98,82	2.237.986.000	527.682.014	23,58
3	Kementerian Dalam Negeri	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	596.763.000	520.568.884	87,23	-	-	-
4	Kementerian Dalam Negeri	Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Kota Adm. Jakarta Pusat	-	-	-	-	-	-	2.992.181.000	-	-	2.110.298.000	66.058.250	3,13	-	-	-
		Kota Adm. Jakarta Utara	-	-	-	-	-	-	3.100.945.000	-	-	2.415.339.000	59.356.850	2,46	-	-	-
		Kota Adm. Jakarta Barat	-	-	-	-	-	-	4.352.199.000	-	-	3.351.557.000	-	-	-	-	
		Kota Adm. Jakarta Selatan	-	-	-	-	-	-	4.525.075.000	-	-	3.350.787.000	83.828.350	2,50	-	-	-
		Kota Adm. Jakarta Timur	-	-	-	-	-	-	5.259.885.000	-	-	4.082.995.000	-	-	-	-	
		Kab. Adm. Kepulauan Seribu	-	-	-	-	-	-	927.455.000	-	-	442.660.000	40.800.000	9,22	-	-	-
5	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	208.122.000	202.150.000	97,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.415.919.000	964.724.750	68,13	863.464.000	243.200.000	28,17	1.096.085.000	747.087.000	68,16	-	-	-	-	-	-
7	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	28.517.025.000	28.229.401.700	98,99	31.036.200.000	29.149.879.584	93,92	9.137.000.000	8.954.656.000	98,00	-	-	-	-	-	-
8	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.200.000.000	1.169.640.000	97,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Kementerian Perdagangan	Dinas Koperasi dan UKM Prov. DKI Jakarta	5.000.000.000	4.647.876.000	92,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH			42.715.161.000	41.152.654.850	96,34	34.226.564.000	31.101.813.634	90,87	40.450.863.000	15.884.254.100	39,27	17.728.289.000	1.989.686.285	11,22	2.837.986.000	1.055.364.028	37,19

Sumber: LKPJ 2013-2016 dan Biro Tata Pemerintahan Semester I 2017

2. PROGRAM DAN REALISASI TUGAS PEMBANTUAN

Program dan realisasi pelaksanaannya dari tiap-tiap kementerian pemberi Dana Tugas Pembantuan dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kementerian Kelautan dan Perikanan

- 1) SKPD pelaksana :
Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
2013 - 2015
Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap
2013 Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya dan Daya Saing Produk Perikanan
2014 Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
2015 - 2017
Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya
- 3) Realisasi :
 - Terlaksananya pengadaan kapal perikanan sebanyak 2 unit, rumah ikan sebanyak 2 unit, ikan induk unggul sebanyak 181.262 ekor, benih ikan mutu terjamin sebanyak 87.709 juta benih, *coolbox* sebanyak 200 boks, sarana pengolahan kerajinan dari bahan kulit kerang dan sarana pemasaran ikan hias
 - Terlaksananya pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan pengawasan kapal perikanan
 - Terlaksananya pengembangan sistem pembenihan ikan, sistem prasarana dan sarana pembudidayaan ikan
 - Tersedianya produk indukan dan pembenihan ikan yang siap sertifikasi, serta meningkatnya produksi perikanan budidaya
 - Tersedianya standart dan sertifikasi inovasi alat tangkap, alat bantu penangkapan ikan, dan kapal penangkapan ikan; serta pengembangan kampung nelayan yang mandiri, indah, tangguh dan maju

- 4) Permasalahan :
Penghematan anggaran tahun 2016 sebesar Rp. 144.191.000,-
berupa *self blocking*

b. Kementerian Pertanian

- 1) SKPD pelaksana :
Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI
Jakarta
- 2) Program :
- 2013 Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman
Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan dan Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing,
Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian.
- 2013 - 2015
Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan
Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan
Halal.
- 2015 - 2017
Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis
Peternakan Rakyat.
- 3) Realisasi :
- Tersedianya pengadaan kendaraan bermotor untuk
Pengawas Benih Tanaman sebanyak 10 unit, 15 ekor bibit
sapi perah, 1 unit lumbung pakan ruminansia, alat penjajaan
dan 2 unit tenda pasar tani
 - Terjaminnya keamanan dan kehalalan pangan asal hewan
serta fasilitasi model penerapan kesejahteraan hewan pada
pemotongan
 - Terlaksananya pembinaan dan peningkatan produksi ternak
dengan pendayagunaan sumber daya lokal
 - Tersedianya sarana dan prasarana Laboratorium Kesehatan
Masyarakat Veteriner (Kesmavet)

c. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

- 1) SKPD pelaksana :
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
2016 Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi
- 3) Realisasi :
 - Terlaksananya pelayanan teknis dan administratif
 - Terlaksananya fasilitasi penempatan dan pemukiman bagi Keluarga transmigran
 - Kerjasama antar daerah.
- 4) Permasalahan :
Penempatan transmigran sebanyak 11 KK dari 16 KK target yang ditetapkan.

d. Kementerian Dalam Negeri

- 1) UKPD pelaksana :
Para Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten Administrasi
- 2) Program :
2016 Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 3) Realisasi :
Tesusunnya laporan penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- 4) Permasalahan :
Revisi DIPA terkait penghematan anggaran melalui blokir mandiri (*self-blocking*) menyebabkan pagu minus, karena blokir dikenakan pada akun yang sebelumnya telah direalisasi.

e. Kementerian Sosial

- 1) SKPD pelaksana :
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
2013 Perlindungan dan Jaminan Sosial
- 3) Realisasi :
 - Terlaksananya pelayanan bantuan terhadap 4.470 korban bencana alam
 - Terlaksananya pemetaan lokasi-lokasi yang rawan sosial.

f. Kementerian Ketenagakerjaan

- 1) SKPD pelaksana :
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
2013 – 2014
Pembangunan Kawasan Transmigrasi
2015 Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi
- 3) Realisasi :
 - Tersusunnya kesepakatan dengan 5 Kabupaten yaitu :
 - Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan
 - Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan
 - Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu
 - Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara
 - Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.
 - Terlaksananya penyuluhan dan penyebaran informasi ketransmigrasian pada 5 Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota/Kab Administrasi
 - Terlaksananya pengerahan, pelatihan, perbekalan dan pemberangkatan calon transmigran sebanyak 42 KK (164 jiwa), ke lokasi transmigrasi sebagai berikut :
 - Lokasi Keliling Semulung Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, sebanyak 14 KK (51 Jiwa)

- Lokasi Jut Nganti Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, sebanyak 14 KK (54 Jiwa)
- Lokasi Lebak Palas Tanah Abang Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, sebanyak 10 KK (49 Jiwa)
- Lokasi Liandok SP. 3 Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, sebanyak 4 KK (10 Jiwa)

g. Kementerian Kesehatan

- 1) SKPD pelaksana :
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
2013 - 2015
Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
- 3) Realisasi :
 - Terlaksananya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas kecamatan dan kelurahan
 - Terlaksananya pengelolaan keuangan dan verifikasi pertanggungjawaban BOK
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi BOK
 - Terlaksananya pembinaan dan pergerakan Tim BOK tingkat provinsi dan kota/ kabupaten
- 4) Permasalahan :
Pelaksanaan revisi DIPA dalam bentuk revisi akun untuk efisiensi anggaran mengakibatkan kegiatan tertunda beberapa waktu karena menunggu penyelesaian proses revisi tersebut.

h. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- 1) SKPD pelaksana :
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
2013 Pengembangan Destinasi Pariwisata

- 3) Realisasi :
 - Terlaksananya pembuatan plaza dan panggung terbuka di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu;
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;

i. Kementerian Perdagangan

- 1) SKPD pelaksana :
Dinas Koperasi, UKM serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
2013 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
- 3) Realisasi :
Terlaksananya revitalisasi Pasar Tradisional Meruya Ilir

C. DEKONSENTRASI

1. INSTANSI PEMBERI TUGAS DAN PELAKSANA DEKONSENTRASI

Selama tahun 2013-2017 Provinsi DKI Jakarta menerima Dana Dekonsentrasi dari 16 Kementerian dan 4 Badan sebagai berikut : Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan, Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pariwisata serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Adapun Badan yang memberikan Dana Dekonsentrasi ke Provinsi DKI Jakarta adalah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/PPN, Arsip Nasional RI dan Perpustakaan Nasional RI.

Nilai keseluruhan Dana Dekonsentrasi yang telah diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebesar 533,32 miliar rupiah dengan realisasi sebesar 402,34 miliar rupiah atau 75,44 persen. Secara rinci Dana Dekonsentrasi yang telah diterima selama tahun 2013-2017 adalah sebagai berikut :

BAB V
PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN DEKONSENTRASI

Tabel V.2
Nilai Dana Dekonsentrasi yang Diterima DKI Jakarta
Tahun Anggaran 2013-2017

NO	Kementerian	SKPD Pelaksana	2013			2014			2015			2016			2017		
			ANGGARAN (4)	REALISASI Rp (5)	% (6 = 4/3)	ANGGARAN (4)	REALISASI Rp (5)	% (6 = 4/3)	ANGGARAN (4)	REALISASI Rp (5)	% (6 = 4/3)	ANGGARAN (4)	REALISASI Rp (5)	% (6 = 4/3)	ANGGARAN (4)	REALISASI Rp (5)	% (6 = 4/3)
1	Kementerian Dalam Negeri	Sekretariat Daerah	3.029.822.000	2.556.613.398	84,38	769.194.000	714.553.000	92,90	537.077.000	429.099.000	79,90	242.318.000	53.169.200	21,94			#DIV/0!
2	Kementerian Dalam Negeri	Badan Pemberdayaan Masy. Perempuan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Kementerian Dalam Negeri	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	852.350.000	779.835.000	91,49	-	-	-	-	-	-	335.570.000	148.700.000	44,31			#DIV/0!
4	Kementerian Dalam Negeri	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	7.137.936.000	97.857.550	1,37	818.911.000	94.775.500	11,57			#DIV/0!
5	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Badan Pemberdayaan Masy. Perempuan dan Keluarga Berencana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000.000	634.500.100	97,62	1.950.000.000	-	-
6	Kementerian Pertanian	Dinas Kelautan dan Perikanan	13.961.846.000	11.073.654.196	79,31	-	-	-	11.553.862.000	9.172.367.013	79,18	7.887.000.000	6.619.587.741	83,93	13.043.566.000	864.949.800	6,63
7	Kementerian Kesehatan	Dinas Kelautan dan Perikanan	2.056.780.000	1.818.320.600	88,41	16.261.453.000	10.761.248.659	66,18	1.200.000.000	1.035.750.290	-	-	-	-	-	-	-
8	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	7.339.054.000	6.180.015.593	84,21	-	-	-	6.969.139.000	5.189.080.244	74,46	8.330.691.000	5.454.186.202	65,47	1.544.784.000	268.927.276	17,41
9	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.004.445.000	695.785.880	69,27	-	-	#DIV/0!
10	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah	1.920.000.000	1.468.421.250	76,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Perindustrian dan Energi	1.363.950.000	1.240.376.130	90,94	1.363.950.000	1.010.999.100	74,12	1.300.000.000	1.123.777.775	86,44	1.599.000.000	1.318.214.256	82,44	1.740.000.000	466.000.200	26,78
12	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	Dinas Perindustrian dan Energi	500.291.000	412.589.988	82,47	519.734.000	123.100.000	23,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan	14.173.656.000	9.086.401.235	64,11	66.616.023.000	36.189.073.669	54,32	20.834.395.000	16.084.068.622	77,20	13.622.573.000	12.304.794.272	90,33	8.793.666.000	2.471.481.800	28,11
14	Kementerian Kesehatan	Dinas Kesehatan	15.222.789.000	12.520.706.329	82,25	17.949.792.000	11.356.598.310	63,27	9.871.151.000	5.277.968.160	53,47	21.026.467.000	17.291.119.094	82,24	31.245.566.000	6.484.782.372	20,75
15	Kementerian Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.019.440.000	5.648.845.500	93,84	5.492.472.000	2.280.562.600	41,52	7.074.886.000	5.446.812.250	76,99	5.752.441.000	4.695.838.330	81,63	4.766.315.000	2.198.248.000	46,12
16	Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	289.270.000	19.150.000	6,62
17	Kementerian Sosial	Dinas Sosial	12.542.210.000	12.167.985.900	97,02	13.916.906.000	13.553.216.230	97,39	16.129.304.000	15.589.463.120	96,68	16.369.476.000	15.656.300.600	95,64	15.863.866.000	6.472.713.000	40,80
18	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan	2.460.887.000	2.321.941.782	94,36	4.470.455.000	3.699.430.522	82,75	5.516.060.000	2.639.868.938	47,86	1.382.186.000	979.984.000	70,83	908.140.000	224.140.800	24,68
19	Kementerian Perdagangan	Dinas Koperasi,UMKM dan Perdagangan	1.882.978.000	1.739.602.203	92,39	-	-	-	1.809.865.000	1.519.874.599	83,99	1.475.114.000	990.255.004	67,13	1.286.865.000	-	-
20	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	Dinas Olah Raga dan Pemuda	4.824.362.000	4.065.972.294	84,28	5.275.011.000	4.775.009.400	90,52	6.076.019.000	5.399.117.348	88,86	4.362.886.000	4.009.011.600	91,89	3.499.901.000	366.957.750	10,48
21	Kementerian Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.550.000.000	1.477.063.000	95,30	800.000.000	69.360.000	8,67	2.151.020.000	2.136.818.200	99,34	1.185.000.000	754.361.800	63,66	1.769.200.000	661.040.233	37,36
22	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan dan Gedung Permukiman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	Badan Pemberdayaan Masy. Perempuan dan Keluarga Berencana	21.474.899.000	20.158.487.691	93,87	34.925.948.000	27.044.073.010	77,43	27.851.366.000	20.773.823.196	74,59	35.930.612.000	29.133.500.191	81,08	28.043.144.000	10.978.756.894	39,15
24	PPN/Bappenas	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	799.290.000	726.554.610	90,90	799.290.000	537.650.000	67,27	799.291.000	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Asip Nasional RI	Badan Asip dan Perpustakaan Daerah	170.000.000	156.930.000	92,31	-	-	-	196.340.000	163.618.000	83,33	307.650.000	302.949.200	98,47	139.050.000	-	-
26	Perpustakaan Nasional RI	Badan Asip dan Perpustakaan Daerah	355.854.000	190.482.780	53,53	236.647.000	-	-	248.480.000	184.232.000	74,14	248.480.000	236.266.400	95,08	248.480.000	-	-
27	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah	-	-	-	-	-	-	883.862.000	548.897.600	62,10	723.181.000	247.194.700	34,18	-	-	#DIV/0!
JUMLAH			112.500.258.000	95.790.799.479	85,15	169.998.875.000	112.114.874.500	66,18	128.169.843.000	92.816.493.905	72,42	123.254.001.000	101.619.494.070	82,45	115.131.657.000	31.477.148.125	27,34

Sumber: LKPU 2013/2016, Bilo Tata Pemerintahan Semester I 2017 dan Kammi DUPN DKI Jakarta Per 6 Juli 2017

2. PROGRAM DAN REALISASI DEKONSENTRASI

Program dan realisasi pelaksanaannya dari tiap-tiap kementerian pemberi Dana Dekonsentrasi dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Kementerian Dalam Negeri

- 1) SKPD pelaksana :
 - Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta (Biro Tata Pemerintahan)
 - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
 - Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
 - 2013 Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
 - 2014 Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerja Sama Daerah
 - 2014 Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan
 - 2016 Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
 - 2015 - 2016
Bina Administrasi Kewilayahan
 - 2015 - 2016
Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 3) Realisasi :
 - Terlaksananya fasilitasi pusat dan daerah, yakni : Peningkatan Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, Kerjasama Daerah, Pelayanan Publik, dan Pembinaan Kecamatan
 - Terselenggaranya rapat dan penyusunan laporan kegiatan Forkompinda dalam rangka persiapan Pemilu Tahun 2014, persiapan Hari Raya Idul Fitri 1435 H, rapat persiapan Hari

Natal dan Tahun Baru 2015, dan rapat koordinasi penyelenggaraan pemerintahan umum di wilayah provinsi

- Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pembakuan Nama-Nama Rupabumi Unsur Alami di Provinsi DKI Jakarta dengan melibatkan Ditjen Pemerintahan Umum, Badan Informasi Geospasial, 6 Wilayah Kota/ Kabupaten Administrasi dan para Camat di Provinsi DKI Jakarta. Hasil dari kegiatan Rupabumi Unsur Alami akan verifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai pendataan rupabumi unsur alami di Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4) Permasalahan :
- Revisi DIPA terkait penghematan anggaran melalui blokir mandiri (*self-blocking*) menyebabkan pagu minus, karena blokir dikenakan pada akun yang sebelumnya telah direalisasi.

b. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- 1) SKPD Pelaksana :
Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
2016 Partisipasi Lembaga Masyarakat Dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KPPPA RI.
2017 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
- 3) Realisasi :
Terlaksananya fasilitasi bagi Pemda untuk pelaksanaan kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
- 4) Permasalahan :
Pencairan dana dengan sistem Uang Persediaan (UP) memerlukan sinkronisasi dengan kebutuhan anggaran per kegiatan agar jumlah nominalnya mencukupi satu kali UP.

c. Kementerian Pertanian

- 1) SKPD Pelaksana :
Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program dan Kegiatan :
 - 2013 - 2014
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
 - 2013 - 2014
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
 - 2013 - 2014
Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
 - 2013 - 2014
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
 - 2013 - 2014
Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani
 - 2013 - 2017
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
 - 2015 – 2016
Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat
 - 2015 Peningkatan Nilai Tambah Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian
 - 2015 - 2016
Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

2016-2017

Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura.

2016 Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian.

2017 Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian

3) Realisasi :

- Terlaksananya pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan dan pengawasan peredaran benih sebanyak 167 sampel
- Terlaksananya sertifikasi benih tanaman pangan seluas 53,5 hektar
- Tersedianya benih bersertifikat dari areal penangkaran
- Terlaksananya penguatan perlindungan tanaman pangan
- Terlaksananya ketersediaan pangan dan penanganan rawan pangan
- Terlaksananya bimtek manajemen dan teknologi pakan
- Terlaksananya pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan menular strategis dan penyakit *zoonosis*
- Terlaksananya penerapan sistem jaminan mutu hasil pertanian
- Terpantaunya harga dan stok pangan di wilayah DKI Jakarta
- Tersusunnya laporan kondisi harga dan stok pangan pokok
- Terlaksananya pendampingan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
- Terlaksananya pemantauan, monitoring, evaluasi dan perumusan kebijakan P2KP
- Terlaksananya pengembangan mutu dan standardisasi
- Terlaksananya pengembangan usaha dan investasi pasar domestik pertanian
- Terlaksananya pengembangan sistem perbenihan, perlindungan serta distribusi tanaman hortikultural dan florikultura

- Terlaksananya pengembangan ketersediaan dan penanganan rawan pangan, keanekaragaman konsumsi pangan serta peningkatan keamanan pangan segar
- Terlaksananya peningkatan produksi ternak dengan pendayagunaan sumber daya lokal
- Terlaksananya pengelolaan sistem penyediaan benih tanaman pangan
- Terlaksananya penguatan perlindungan tanaman pangan dari gangguan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) dan Dampak Perubahan Iklim (DPI)
- Terlaksananya sertifikasi benih tanaman hortikultura untuk menghasilkan benih tanaman sebanyak 3.000 tanaman dan fasilitasi pemasaran hortikultura
- Terjaminnya ketersediaan bibit ternak dan mutu bibit ternak
- Terjaminnya keamanan dan kehalalan pangan asal hewan dan produk hewan non pangan
- Meningkatnya kinerja penyuluh pertanian, peningkatan kapasitas kelembagaan petani, pemantapan sistem penyuluhan pertanian/ ketenagaan penyuluhan yang difasilitasi dan perangkat pengolah data dan komunikasi.

d. Kementerian Kelautan dan Perikanan

- 1) SKPD Pelaksana :
Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
2014 Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan;
2015 Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
2015 Peningkatan Daya Saing, Usaha dan Produk Kelautan dan Pertanian
2016 Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

2016 Pengelolaan Ruang Laut.

2016 Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat
Kelautan Dan Perikanan.

2017 Pengelolaan Perikanan Tangkap

2013-2014

Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

2013-2014

Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil

2013-2014

Peningkatan Daya Saing Produk Perikanan

2013-2014

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

2013-2015

Pengembangan Krantina Ikan, Pengendalian Mutu dan
Keamanan Hasil Perikanan

2013-2015

Pengembangan dan Pengelolaan Perikanan Tangkap

2013-2015

Pengembangan SDM Kelautan dan Perikanan

2013-2017

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan

2015-2017

Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya

2016-2017

Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

3) Realisasi :

- Terlaksananya pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan pelabuhan perikanan
- Terlaksananya pengembangan usaha penangkapan ikan dan pemberdayaan nelayan skala kecil

- Terlaksananya sistem perbenihan dan produksi pembudidayaan ikan, serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan
- Terlaksananya rehabilitasi perairan budi daya perikanan di sentra-sentra produksi
- Terlaksananya penyelesaian tindak pidana kelautan dan perikanan sebanyak 13 laporan
- Terlaksananya peningkatan operasional pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
- Terlaksananya pengembangan pemasaran dalam negeri hasil perikanan melalui pembinaan pasar higienis 147 pasar dan promosi GEMARIKAN
- Terlaksananya pengembangan pemasaran luar negeri hasil perikanan melalui pembinaan eksportir 5 UKM dan pengendalian impor hasil perikanan 4 kali
- Terlaksananya pengembangan industri pengolahan hasil perikanan, produk hasil perikanan non konsumsi, pembinaan dan pengembangan sistem usaha dan investasi perikanan
- Terlaksananya penataan ruang dan perencanaan pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil melalui penyusunan draft Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

4) Permasalahan :

Kegiatan pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) dan kemitraan usaha tidak dilaksanakan karena belum ada KUB dan mitra usaha yang sanggup untuk melakukan perjanjian kerja sama usaha mitra KUB dengan mitra usaha. Untuk itu perlu optimalisasi pendampingan KUB dan mitra usaha.

e. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

1) SKPD Pelaksana :

Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta

- 2) Program dan Kegiatan :
- 2013 Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan Limbah B3, Pemantauan Kualitas Air Dan Udara Skala Nasional Melalui Program PROPER
 - 2013 Pemantauan Kualitas Air Sungai Skala Nasional dan/atau Lintas Batas Negara
 - 2013 Pemantauan Kualitas Udara Di Wilayah Perkotaan yang Bersifat Strategis Nasional
 - 2013 Pembinaan Sekolah Adiwiyata
 - 2013-2014
Peningkatan Usaha Kehutanan
 - 2013-2014
Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
 - 2013-2014
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Perlindungan Hutan
 - 2013-2014
Perencanaan Makro Bidang Kehutanan dan Pemantapan Kawasan Hutan
 - 2013-2014
Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan
 - 2015-2016
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 3) Realisasi :
- Terlaksananya inspeksi lapangan dan pengolahan data supervisi terhadap peserta proper
 - Terlaksananya pemantauan kualitas air sungai
 - Terlaksananya pemantauan uji emisi, *traffic counting*, udara *road side* dan kualitas BBM
 - Terlaksananya Program Sekolah Adiwiyata Kota/ Kabupaten

- Terlaksananya sosialisasi sistem verifikasi legalitas kayu dan pengawasan peredaran hasil hutan
- Terlaksananya penanaman mangrove 6.000 batang
- Terlaksananya pembersihan sampah di kawasan Hutan Lindung Angke Kapuk
- Terlaksananya penyusunan buku neraca sumber daya hutan, penyusunan data dan informasi
- Terlaksananya pelaksanaan lomba penghijauan dan konservasi wana lestari
- Terlaksananya pengembangan kawasan konservasi, ekosistem esensial dan pembinaan hutan lindung

f. Kementerian Perindustrian

- 1) SKPD pelaksana :
Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
2013 – 2014
Revitalisasi dan penumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
2015-2017
Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- 3) Realisasi :
 - Terselenggaranya pelatihan teknis/ manajemen sebanyak 190 orang
 - Terselenggaranya sosialisasi One Village One Product (OVOP) bagi Pembina dan Pelaku IKM untuk sentra komoditi makanan minuman
 - Terasilitasinya sejumlah 3 IKM pada pameran untuk komoditi pakaian
 - Terlaksananya penumbuhan dan pengembangan WUB (wirausaha baru) komoditi makanan minuman 35 orang

- Terbentuknya 1 Unit Pendampingan Langsung (UPL) kepada sejumlah 10 IKM
- Terlaksananya Pelatihan pengembangan desain dan diversifikasi produk pakaian jadi
- Terlaksananya pelatihan kemasan bagi IKM makanan dan minuman
- Terlaksananya fasilitasi sertifikasi halal
- Terlaksananya keikutsertaan pada pameran bertaraf internasional bagi IKM meuble kayu
- Terlaksananya sosialisasi petunjuk teknis dan operasional forum koordinasi OVOP (FKO) Provinsi DKI Jakarta
- Terlaksananya pelatihan wirausaha baru IKM meuble kayu
- Terlaksananya partisipasi rapat koordinasi nasional penyusunan program 2015
- Terlaksananya rakor penyusunan program revitalisasi dan penumbuhan IKM T.A 2015
- Terlaksananya penyusunan laporan kinerja pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi
- Terlaksananya sosialisasi dan seleksi UPAKARTI 2014
- Terlaksananya penyusunan LAKIP dan TAPKIN
- Terlaksananya sosialisasi dan seleksi *Indonesia Good Design Selection*
- Terlaksananya sosialisasi dan seleksi kreasi prima mutu
- Terlaksananya penyebaran dan penumbuhan industri kecil dan menengah Wilayah II, daerah pengembang industri melalui dekonsentrasi (1 daerah)
- Terlaksananya daerah pengembangan industri.

g. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

- 1) SKPD pelaksana :
Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta

- 2) Program :
2013 & 2016
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas dan Teknis
Lainnya
- 3) Realisasi :
 - Tersusunnya Kajian Komoditi Unggulan Prov. DKI Jakarta, laporan koordinasi kebijakan dan program sektor ESDM;
 - Terlaksananya pembinaan dan koordinasi perencanaan dan kerjasama dengan Kementerian ESDM

h. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

- 1) SKPD pelaksana :
Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
2013 - 2014
Pendidikan Dasar
2013 - 2014
Pendidikan Menengah
2013 - 2014
Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal
2015 dan 2016
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknisnya
Lainnya Sekretariat Kemendikbud RI
2015 - 2016
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
2015 - 2017
Pendidikan Dasar dan Menengah
2016-2017
Guru dan Tenaga Kependidikan.
- 3) Realisasi :
 - Terlaksananya lomba olahraga nasional/ internasional dan meraih 18 medali

- Terlaksananya festival lomba seni siswa nasional/ internasional dan meraih 21 medali
 - Terlaksananya lomba kompetensi, sains, olahraga dan seni dan meraih 1 medali
 - Terlaksananya pemberian beasiswa bakat dan prestasi kepada 266 siswa SMP
 - Terselenggaranya 41 jenis lomba festival dan olimpiade
 - Terlaksananya pemenuhan standar kompetensi lulusan dan penilaian oleh 500 sekolah
 - Terselenggaranya lomba sains nasional/ internasional dan meraih 30 medali internasional, 88 medali lomba debat bahasa indonesia serta 3 medali lomba debat bahasa asing
 - Terlaksananya program kursus dan pelatihan berbasis Pendidikan dan Kecakapan Hidup (PKH) oleh 713 orang
 - Tersedianya layanan kursus dan pelatihan, PAUD serta pendidikan masyarakat
 - Tersedianya dan peningkatan mutu pendidik dan tendik PAUD Non Formal;
 - Meningkatnya Akses dan Mutu PK dan PLK SDLB/SMPLB;
 - Tersedianya penjaminan kepastian layanan pendidikan SD dan SMP;
 - Tersedianya lembaga PAUD baru serta alat permainan edukatif;
 - Tersedianya data guru dan tenaga kependidikan yang terverifikasi dan tervalidasi menurut kabupaten/ kota.
- 4) Permasalahan:
- Sesuai dengan kebijakan Kemendikbud RI untuk tidak menjalankan kegiatan tingkat nasional, maka kegiatan yang terkait dengan hal tersebut tidak dilaksanakan.

i. Kementerian Kesehatan

- 1) SKPD pelaksana :
Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
 - 2013 Pembinaan Upaya Kesehatan;
 - 2013 Bina Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak;
 - 2013 Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;
 - 2017 Pembinaan Kesehatan Masyarakat
 - 2017 Pembinaan Pelayanan Kesehatan
 - 2017 Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
 - 2013 dan 2017
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Kementerian Kesehatan;
 - 2013 dan 2017
Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan.
 - 2013 dan 2017
Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
- 3) Realisasi :
 - Terlaksananya pelayanan kesehatan ibu dan anak, *surveilans*, imunisasi, karantina, kesehatan matra, pengembangan pembiayaan, jaminan pemeliharaan kesehatan, pengembangan dan pengawasan program pelayanan kesehatan
 - Terlaksananya peningkatan kesehatan jamaah haji
 - Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dan promosi kesehatan
 - Terlaksananya penyehatan lingkungan
 - Terlaksananya pengendalian penyakit bersumber binatang, penyakit menular langsung, penyakit tidak menular
 - Tersedianya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, program kefarmasian dan alat

kesehatan, program pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan

- Terlaksananya peningkatan pelayanan kefarmasian, ketersediaan obat publik dan perbekalan kesehatan, produksi dan distribusi alat kesehatan, produksi dan distribusi kefarmasian
- Terlaksananya pembinaan administrasi kepegawaian, pengelolaan administrasi keuangan, gizi masyarakat, upaya kesehatan kerja dan olahraga

j. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1) SKPD pelaksana :

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta

2) Program :

2014 Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;

2015 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penelitian Kerja

2013-2014

Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja

2013-2017

Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

2013 & 2015 - 2017 Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

2013-2014 & 2016-2017

Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

2015-2016

Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

3) Realisasi :

- Terlaksananya pembinaan desa produktif sebanyak 40 orang

- Terlaksananya pengumpulan data bidang pelatihan, produktivitas, dan ketransmigrasian dengan mengundang pihak-pihak terkait sebanyak 60 orang
- Terlaksananya optimalisasi komite akreditasi lembaga pelatihan kerja
- Terlaksananya pelatihan terhadap 500 orang pemagangan dalam negeri
- Terlaksananya seleksi 300 orang calon kompetitor Indonesia Skills Competition X untuk 5 kejuruan
- Terlaksananya pembinaan norma kerja dan jaminan sosial tenaga kerja sebanyak 40 orang serta norma kerja perempuan di tempat kerja sebanyak 40 orang
- Terlaksananya pembinaan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) pada perusahaan sebanyak 240 orang, petugas K3 kimia pada perusahaan sebanyak 40 orang serta teknisi K3 listrik pada perusahaan sebanyak 40 orang
- Terlaksananya perlindungan terhadap tindak kekerasan dan pekerja migran bermasalah sebanyak 30 orang
- Terlaksananya peningkatan pelayanan terhadap kualitas 30 orang petugas pelayanan penempatan dan perlindungan TKI
- Terlaksananya pembinaan perusahaan dan serikat pekerja mengenai tata cara pembuatan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama sebanyak 30 orang, tata cara pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit perusahaan sebanyak 30 orang dan efektivitas Lembaga Kerjasama Tripartit di Sudin Nakertrans sebanyak 75 orang
- Terlaksananya penyelesaian perselisihan Hubungan Industrial (HI) oleh pegawai mediator sebanyak 220 kasus di dalam tahun 2013
- Terlaksananya pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) dari Dinas dan Sudin Nakertrans

- Terlaksananya pengelolaan kelembagaan Hubungan Industrial melalui peningkatan penerapan pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dalam rangka pencegahan PHK dan perselisihan hubungan industrial
- Tersedianya peningkatan kapasitas kelembagaan, sarana dan pemberdayaan kelembagaan pelatihan dan produktivitas
- Terselenggaranya pendampingan masyarakat dan tersalurkannya bantuan sarana usaha pada kelompok usaha di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan.
- Meningkatnya pengusaha, pekerja/SP/SB yang memahami tata cara pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit
- Meningkatnya Perjanjian Bersama (PB) yang dihasilkan oleh mediator HI dalam penyelesaian perselisihan HI
- Tersedianya pelaku hubungan industrial yang mendapatkan pelatihan teknik negosiasi;
- Tersedianya pengawas yang mendapatkan pembinaan teknis penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan;
- Tersedianya lembaga pelatihan yang terakreditasi.

k. Kementerian Sosial

- 1) SKPD pelaksana :
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
2013-2017
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
lainnya
2013-2017
Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
2013-2017
Rehabilitas Sosial
2013-2017
Perlindungan dan Jaminan Sosial

2016-2017

Penanganan Fakir Miskin

3) Realisasi :

- Terlaksananya penyuluhan kesejahteraan sosial terhadap 50 orang
- Terlaksananya bantuan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan dan pekerja migran yang bermasalah sebanyak 30 orang
- Terlaksananya rehabilitasi dan perlindungan terhadap anak balita, anak terlantar, dan anak berkebutuhan khusus untuk mendapat layanan program kesejahteraan sosial anak sebanyak 550 orang
- Terlaksananya pelatihan terhadap organisasi sosial berupa pelatihan peningkatan kemampuan sebanyak 61 orsos dan peningkatan kemampuan terhadap 56 karang taruna
- Terlaksananya pemberian bantuan terhadap keluarga rentan/ wanita rawan sosial ekonomi sebanyak 160 KK
- Terlaksananya pelatihan dan bimbingan teknis terhadap 280 orang petugas perlindungan sosial korban bencana alam
- Terlaksananya pelayanan sosial terhadap lanjut usia sebanyak 250 orang
- Terlaksananya pelatihan teknis SDM bidang pelayanan sosial lanjut usia sebanyak 97 orang.
- Terselenggaranya rehabilitas sosial korban penyalahgunaan NAPZA
- Terselenggaranya rehabilitas sosial orang dengan kecacatan
- Terselenggaranya rehabilitas tuna sosial
- Terlaksananya perlindungan sosial korban bencana alam dan bencana sosial
- Terlaksananya jaminan kesejahteraan sosial (bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan)
- Tersedianya Asuransi Kesejahteraan Sosail (Askesos)
- Meningkatnya KUBE yang mendapat bantuan

- Terbentuknya lansia potensial yang dapat diberdayakan melalui Usaha Ekonomi Produktif (UEP)
 - Tersedianya pemetaan daerah rawan bencana sosial
 - Terlaksananya rehab dan pemeliharaan TMPN/ TMP/ MPN
 - Terlaksananya lokasi kampung siaga bencana
- 4) Permasalahan :
- Kajian Pemetaan Desa Rawan Bencana Sosial tidak dilaksanakan karena merupakan tupoksi dari Bakesbangpol Provinsi DKI Jakarta.

I. Kementerian Koperasi dan UMKM

- 1) SKPD pelaksana :
Dinas Koperasi dan UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
2014 Pengembangan Keanggotaan Koperasi melalui Peningkatan kerja sama koperasi dan penyuluhan dalam rangka gerakan masyarakat sadar koperasi
2013-2014
Pemberdayaan Koperasi dan UKM
2015-2017
Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi
- 3) Realisasi :
 - Tersusunnya dokumen perencanaan program dekonsentrasi: partisipasi rapat di lingkungan Dinas KUMKMP, revitalisasi 40 koperasi, pendataan UKM;
 - Terlaksananya 6 pameran dengan peserta 6 koperasi di masing-masing pameran;
 - Terlaksananya monitoring dan evaluasi berupa penyusunan laporan dan pelaksanaan monitoring;
 - Terlaksananya sosialisasi perundang-undangan perkoperasian yang diikuti 400 koperasi;

- Tersusunnya dokumen perencanaan program dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan UKM;
 - Terlaksananya pemberdayaan koperasi;
 - Terlaksananya pameran produk KUKM;
 - Terlaksananya pemasyarakatan perkoperasian;
 - Terlaksananya revitalisasi PPKL;
 - Terselenggaranya pameran produk KUKM;
 - Terlaksananya Diklat Penyuluhan Koperasi;
 - Terlaksananya penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
- 4) Permasalahan :
- Juklak dan Juknis Pelaksanaan tidak sesuai dengan komponen anggaran, sehingga anggaran tidak dapat diserap maksimal.

m. Kementerian Perdagangan

- 1) SKPD pelaksana :
Dinas Koperasi dan UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
2013-2017
 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri.
2013-2017
 Peningkatan Perdagangan Luar Negeri
- 3) Realisasi :
 - Terlaksananya pasar murah di 5 wilayah
 - Terlaksananya partisipasi UKM DKI Jakarta pada pameran produk dalam negeri pada pameran Pangan Nusa Regional dan Nasional, Lombok Expo serta Nusantara Expo
 - Terlaksananya penyusunan data dan laporan harga bahan pokok, barang strategis dan data penerbitan SIUP
 - Terlaksananya pengawasan jasa kemetrolagian dan pasar tertib ukur
 - Terlaksananya Diklat Ekspor-Import

- Terfasilitasinya promosi ekspor dan ekspor yang diikuti 28 UKM DKI Jakarta
- Tersusunnya laporan kondisi pasar tradisional dan jumlah pedagang di pasar tradisional
- Terlaksananya pemuktakhiran data pengaduan konsumen dan sosialisasi perlindungan konsumen
- Terlaksananya pengawasan produk SNI Wajib dan distribusi GKR, B2 dan pupuk bersubsidi
- Tersedianya layanan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan Angka Pengenal Importir (API) online
- Terlaksananya sosialisasi ASEAN Economic Community (AEC) di daerah
- Terlaksananya koordinasi ekspor dan impor pusat dengan daerah
- Terlaksananya penanganan masalah perdagangan luar negeri di daerah.

n. Kementerian Pemuda dan Olahraga

- 1) SKPD pelaksana :
Dinas Olahraga dan Pemuda Prov. DKI Jakarta
- 2) Program :
2013 & 2016-2017
Kepemudaan dan Keolahragaan
2014-2015
Pengembangan Kewirausahaan Pemuda;
2014-2015
Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda;
2014-2015
Pengembangan Kepemimpinan Pemuda;
2014-2015
Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan;
2014-2015
Pengembangan Kepramukaan;

2014-2015

Peningkatan Wawasan Pemuda;

2014-2015

Pengembangan Olahraga Layanan Khusus;

2014-2015

Pengembangan Sentra Kelolahragaan;

2014-2015

Pengembangan Pembibitan Olahragawan;

2014-2015

Pengembangan Tenaga Keolahragaan

3) Realisasi :

- Terlaksananya fasilitasi pengembangan pemuda kader kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawan, kepeloporan, serta kewirausahaan dan fasilitas akses permodalan provinsi
- Terlaksananya pengelolaan program Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) dan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Perdesaan (PSP 3)
- Terlaksananya pelatihan manajemen dan perencanaan bagi organisasi pelajar, mahasiswa dan kepemudaan dan kepramukaan
- Tersedianya bantuan kepada kwartir daerah dan kwartir cabang
- Terlaksananya Bakti Pemuda Antar Provinsi dan Jambore Pemuda Indonesia (JPI)
- Terlaksananya festival olahraga lansia, olahraga tradisional dan senam kesegaran jasmani
- Terlaksananya pengembangan olahraga rekreasi dan pelayanan informasi keolahragaan
- Terlaksananya test pengukuran, pembinaan serta pengembangan atlet pada Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan Pusat Pendidikan dan Latihan Mahasiswa (PPLM)
- Terlaksananya pelatihan pelatih usia dini

- Terlaksananya pengiriman atlet untuk Kejuaraan antar PPLP dan Kejurnas antar PPLM
- Tersedianya para peserta olahraga usia dini dan lansia, olahraga penyandang cacat dan olahraga di lembaga permasyarakatan
- Tersedianya bantuan pembinaan klub olahraga junior di DKI Jakarta
- Tersedianya Kontingen Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) Provinsi DKI Jakarta
- Tersedianya peserta festival dan invitasi olahraga tradisional;
- Tersedianya Peserta pemanduan bakat cabang olahraga unggulan
- Tersedianya fasilitas penyelenggaraan Kejuaraan olahraga junior/pelajar/ bertaraf regional, nasional dan International
- Tersedianya pelatih dan instruktur, wasit dan juri, tenaga pendidikan dan pendukung yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan

o. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

- 1) SKPD pelaksana :
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
2013 Pengembangan Pemasaran Pariwisata
2014 Pengembangan Pariwisata Dalam Negeri
2013-2014
Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media Desain dan Iptek (EKMDI)
2015-2017
Pengembangan Kepariwisata
- 3) Realisasi :
 - Terlaksananya pagelaran Budaya Betawi di Situ Babakan;
 - Terlaksananya usaha kreatif bidang ekonomi kreatif berbasis media, desain dan iptek

- Tersusunnya Kajian Ekonomi Kreatif Bidang Informasi Teknologi pada platform digital informasi di Provinsi DKI Jakarta dan Usaha Kreatif bidang Informasi Teknologi
 - Terlaksananya penyusunan laporan perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan Kajian Ekonomi Usaha Kreatif
 - Terlaksananya event pariwisata daerah tahunan
 - Terselenggaranya pengembangan infrastruktur dan ekosistem pariwisata di destinasi pariwisata
 - Meningkatnya tata kelola destinasi dan pemberdayaan masyarakat
 - Terselenggaranya pengembangan segmen pasar personal tingkat Kota/Kabupaten/Kawasan Pariwisata yang difasilitasi melalui pemberdayaan masyarakat.
- 4) Permasalahan:
- Kegiatan anggaran tidak dimanfaatkan sebagai tindak lanjut Inpres Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan Belanja K/L Dalam Rangka Pelaksanaan APBN-P T.A 2016

p. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

- 1) SKPD Pelaksana :
Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
2015-2016
Pengembangan Perumahan.
- 3) Realisasi :
 - Tersusunnya laporan pembinaan dan peningkatan kapasitas kelembagaan pelaku penyediaan perumahan;
 - Terlaksananya pembinaan kelembagaan dan perencanaan.

q. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

- 1) SKPD pelaksana :
Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Prov. DKI Jakarta
- 2) Program :
2014 Kependudukan dan Keluarga Berencana/Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB di Provinsi
2015 Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2013 & 2015
Kependudukan dan Keluarga Berencana (KB)
2016-2017
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BKKBN
- 3) Realisasi :
 - Terlaksananya pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga, kesertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan KBKR yang sesuai dengan standard pelayanan kepada 1.384.316 peserta KB
 - Terlaksananya Penelitian Kependudukan dan KB
 - Terlaksananya kerjasama dan pembinaan mitra kerja program kependudukan dan KB
 - Terlaksananya pelatihan SDM untuk pelayanan KB
 - Terselenggaranya dukungan manajemen BKKBN di provinsi
 - Tersusunnya rancangan induk pengendalian penduduk
 - Terlaksananya advokasi dan penggerakan
 - Terlaksananya pengelolaan data dan informasi pembangunan KKB
 - Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pembinaan pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB
 - Tersedianya dukungan operasional Pengendali Petugas Lapangan KB (PPLKB), Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

- Tersedianya penguatan jejaring mekanisme operasional Program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) di Lini Lapangan
- Terlaksananya fasilitasi dalam peningkatan pengarusutamaan gender serta pemenuhan hak dan perlindungan anak
- Terlaksananya Rancangan Induk Pengendalian Penduduk di
- Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pembinaan pengelolaan pembangunan kependudukan dan KB
- Tersedianya dukungan manajemen pengelolaan dan pengawasan intern yang efektif dan efisien terhadap pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)
- Terlaksananya pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan program KKBPK
- Terlaksananya sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk
- Terlaksananya penggerakan stakeholder, mitra kerja, serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat, berdasarkan data dan informasi yang berbasis IT melalui program KKBPK

r. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

- 1) SKPD pelaksana :
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
2013 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Bappenas
2014-2015
Perencanaan Pembangunan Nasional
- 3) Realisasi :
 - Terselenggaranya Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penilaian dan penghargaan terhadap dokumen perencanaan daerah (Anugerah Pangripta Nusantara),

Rapat koordinasi Penanganan Permasalahan Strategis Wilayah Jabodetabek, Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 114/2012 dan Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium Tahun 2011 di Indonesia, dan Workshop Perencanaan Implementasi Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) oleh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

- Tersedianya pelatihan bagi pelatih *Pro Poor Planning and Budgeting Monitoring (P3BM)*;
- Terlaksananya peluncuran database MDGs;
- Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan nasional lintas bidang di daerah

s. Arsip Nasional Republik Indonesia

- 1) SKPD Pelaksana :
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
2014-2017
Penyelenggaraan Kearsipan Nasional
- 3) Realisasi :
 - Terlaksananya pendidikan dan pelatihan kearsipan bagi Sekretaris Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta;
 - Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan bagi provinsi penerima dana dekonsentrasi (Prioritas K/L).

t. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

- 1) SKPD pelaksana :
Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2) Program :
2013-2017 Pengembangan Perpustakaan
- 3) Realisasi :
 - Terlaksananya pembinaan administrasi keuangan;
 - Terlaksananya kampanye perpustakaan dan minat baca;

- Terlaksananya lomba minat baca, perpustakaan sekolah terbaik dan perpustakaan umum terbaik
- Terlaksananya pembinaan dan pengembangan Perpustakaan.